
ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT TATA KELOLA TI DALAM KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS XYZ

Siti Sahala Tunnazwa¹⁾, Rangga Adi Bahagiawan²⁾, Dwi Sukma Nurahmi³⁾, Wisnu Uriawan⁴⁾

^{1,2,3}Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

⁴Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence author: S. S. Tunnazwa, ssahalatunn@gmail.com, Bandung, Indonesia

Abstract

University libraries are required to adapt to the development of information technology, including the management of membership data. At University XYZ, the integration process between the library system (OpenBiblio) and the academic system (SALAM) has been operational since 2020; however, it has not been fully optimized, particularly for postgraduate students. This study aims to identify factors that support and hinder information technology governance in the integration of membership data, and to formulate strategic steps to strengthen library membership services. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews and observations of the PTIPD unit and the library's IT department. The results showed that policy support for digitization, communication between parties, and data injection routines were the main driving factors. On the other hand, limited human resources, lack of standard procedures, and weak coordination are significant obstacles. This research presents a cross-unit collaborative approach as a response to these problems, including the establishment of cross-unit work teams, periodic coordination forums, and the preparation of shared performance indicators (collaborative KPIs). This research confirms that effective IT governance is not only determined by technical aspects, but also by the quality of coordination and synergy between units in the organization..

Keywords: *information technology, governance, library system, academic system*

Abstrak

Perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk dalam pengelolaan data keanggotaan. Di Universitas XYZ, proses integrasi antara sistem perpustakaan (OpenBiblio) dengan sistem akademik (SALAM) telah berjalan sejak 2020, namun belum sepenuhnya optimal, khususnya untuk mahasiswa pascasarjana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tata kelola teknologi informasi dalam proses integrasi data keanggotaan, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat layanan keanggotaan perpustakaan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap unit PTIPD dan unit TI perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan

digitalisasi, komunikasi antarpihak, serta rutinitas injeksi data merupakan faktor pendorong utama. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya standar prosedur, serta lemahnya koordinasi menjadi hambatan yang cukup signifikan. Penelitian ini menyajikan pendekatan kolaboratif lintas unit sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, antara lain melalui pembentukan tim kerja lintas unit, forum koordinasi berkala, serta penyusunan indikator kinerja bersama (KPI kolaboratif). Dari penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola TI yang efektif tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas koordinasi dan sinergi antar unit dalam organisasi.

Kata Kunci: teknologi informasi, tata kelola, perpustakaan, sistem akademik

A. PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat masih memandang perpustakaan sebagai suatu tempat penyimpanan buku saja. Faktanya, pandangan seperti itu sepenuhnya salah karena perpustakaan sendiri merupakan tempat yang berisi kumpulan informasi baik berupa bahan buku maupun bahan non buku yang telah diolah dan disusun oleh sistem informasi tertentu agar pemustaka bisa mengambil manfaatnya. Perpustakaan juga memiliki peran vital dalam membantu proses belajar. Selain itu, terdapat perpustakaan yang berada di ranah lembaga pendidikan, misalnya perpustakaan perguruan tinggi. Adanya perpustakaan perguruan tinggi tidak lain untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, riset, serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi, sasaran perpustakaan perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan dan informasi adalah civitas akademika yang terdaftar dalam universitas tersebut. Untuk memberikan pelayanan yang optimal, perpustakaan haruslah memiliki pengelolaan yang baik karena faktor tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perpustakaan.

Di era perkembangan teknologi informasi ini, hampir semua jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan perguruan tinggi, dibantu oleh penggunaan teknologi informasi untuk aktivitas pengelolaan perpustakaannya. Sebagai

perpustakaan yang telah berdampingan dengan teknologi, sudah seharusnya perpustakaan mengikuti perkembangan zaman agar tidak ditinggalkan oleh pemustaka. Apalagi saat ini teknologi informasi sangat membantu perpustakaan perguruan tinggi dalam mengelola koleksi yang berjumlah ribuan dan pemustaka yang begitu banyak. Salah satu kemudahan dari penggunaan teknologi informasi di perpustakaan perguruan tinggi adalah keanggotaan perpustakaan. Dengan teknologi informasi ini proses pengelolaan data keanggotaan akan terautomasi.

Namun, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keanggotaan secara bersamaan harus beriringan dengan tata kelola TI atau *IT Governance* yang baik. Umumnya, tata kelola TI tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perpustakaan, sehingga pengelolaan TI merupakan hal yang krusial karena berkaitan dengan penyampaian *value*, kinerja dan manajemen risiko, serta berfokus pada bagaimana suatu lembaga mengambil keputusan, dari siapa yang memutuskan, apa yang diputuskan, sampai mengapa keputusan itu dibuat. Dengan demikian, tata kelola TI ini sebenarnya berkaitan erat dengan sumber daya manusia, proses dan budaya kerja di dalamnya. Permasalahan tata kelola TI ini juga sejalan dengan pendapat (Pratiwi & Widianti, 2025) yang menyatakan bahwa tata kelola TI adalah suatu hubungan dan proses yang bersifat hierarkis untuk mengarahkan serta mengatur instansi untuk

mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan teknologi informasi sekaligus mempertimbangkan risiko pemanfaatannya. Maksud dari hierarkis tersebut karena adanya campur tangan pembuat kebijakan dalam menciptakan keharmonisan antara TI dengan organisasi, sehingga sering kali pembuat kebijakan disebut sebagai peranan kunci keberhasilan pengelolaan TI yang baik. Dalam hal perencanaan dan pengelolaan TI yang berkaitan dengan keanggotaan, umumnya bersifat hierarkis. Artinya peran dari pimpinan atas sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dalam keanggotaan. Selain pimpinan, manajemen organisasi TI bersama-sama dengan sumber daya perpustakaan ikut menentukan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang telah ditentukan.

Proses pengelolaan data keanggotaan di Perpustakaan Universitas XYZ sudah dilakukan secara otomatis. Proses ini dimulai dari tahap penerimaan mahasiswa baru. Seseorang yang sudah diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas XYZ akan secara otomatis menjadi anggota perpustakaan Universitas XYZ karena OpenBiblio sebagai sistem informasi perpustakaan Universitas XYZ sudah terintegrasi dan tersinkronisasi dengan sistem akademik SALAM yang dikelola oleh PTIPD Universitas XYZ. Integrasi data mahasiswa sarjana dan dosen antara OpenBiblio dengan SALAM sudah terlaksana sejak tahun 2020, sedangkan integrasi data untuk mahasiswa pascasarjana baru dilakukan pada tahun 2023. Lalu, berdasarkan hasil pengamatan lainnya, tidak semua data mahasiswa pascasarjana tahun ajaran 2022 ke bawah terinput ke dalam sistem akademik kampus. Selain itu, dalam rentang periode dari 2023 sampai 2025 ini, integrasi data mahasiswa pascasarjana tahun ajaran 2022 ke bawah dari SALAM ke OpenBiblio masih belum sepenuhnya jelas sudah dilakukan atau belum dilakukan. Permasalahan ini berimbas kepada mahasiswa pascasarjana

tersebut karena tidak bisa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan seperti mahasiswa sarjana. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan keuntungan lainnya seperti KTM yang dimilikinya belum terintegrasi dengan teknologi pendukung, dan sebagainya. Berdasarkan gambaran umum tersebut dapat diketahui bahwa keselarasan antara bisnis dan TI memang sangat penting perannya bagi suatu lembaga yang ingin memanfaatkan teknologi informasi dengan syarat mempertimbangkan risiko yang akan didapat di kemudian hari.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai tata kelola TI pada sebuah lembaga, seperti penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Data Antar Unit TI: Studi Kasus Pusintek XYZ” oleh (Heriyanto, 2018). Penelitian ini berfokus dalam mengeksplor faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja fungsi dari Pusintek dan menganalisis hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor tersebut. “Pemetaan Model Tata Kelola Teknologi Informasi yang Menunjang Strategi dan Visi Organisasi di Indonesia pada Bank Swasta XYZ” oleh (Arbiansyah et al., 2010). Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tata kelola TI yang sudah ada pada Bank XYZ menggunakan tiga kerangka kerja yaitu kerangka kerja struktur-proses-hubungan, kerangka kerja *IT Governance Institute*, serta kerangka kerja *Australian Standard for Good Corporate Governance of ICT*. Selain itu, terdapat penelitian lain yang berjudul “Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Instansi (Systematic Literature Review)” oleh (Ramadhani et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan dalam proses tata kelola TI serta membuat rekomendasi yang efektif untuk meningkatkannya. Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menganalisis secara komprehensif apa saja faktor pendukung dan penghambat dari tata kelola TI antara Perpustakaan Universitas XYZ dengan PTIPD terhadap kinerja integrasi data menggunakan model Peterson, serta langkah strategis yang sebaiknya diambil untuk keberhasilan layanan keanggotaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan optimalisasi tata kelola TI perpustakaan agar mencapai pelayanan keanggotaan perpustakaan yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga tata kelola teknologi informasi dalam konteks integrasi data mahasiswa antara sistem OpenBiblio dan SALAM di lingkungan Universitas XYZ dapat digambarkan secara lebih mendalam. Menurut (Rahardjo, 2017), Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut, oleh karenanya studi kasus dipilih dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi berbagai persoalan dalam tata kelola TI secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek organisasi, implementasi, dan relasi di antara unit terkait.

Penelitian ini membahas praktik tata kelola TI dengan berfokus pada data keanggotaan perpustakaan yang terintegrasi pada dua sistem berbeda, yaitu OpenBiblio sebagai sistem manajemen perpustakaan, dengan SALAM sebagai sistem informasi akademik. Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup terbatas di lingkungan Universitas XYZ, yaitu pada unit Perpustakaan yang menggunakan sistem OpenBiblio, serta Pusat Teknologi

Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) yang mengelola sistem SALAM. Objek penelitian ini terletak di proses tata kelola TI khususnya pada data keanggotaan antar sistem, lebih jelasnya bagaimana tata kelola data keanggotaan yang tergabung di kedua sistem tersebut dapat menimbulkan faktor yang saling mempengaruhi, dalam hal ini pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mengacu pada kondisi yang memicu tata kelola TI berjalan dengan efektif, sementara faktor penghambat merupakan kondisi yang mengakibatkan tata kelola tidak berjalan secara optimal.

Subjek dalam penelitian ini di antaranya staf perpustakaan bagian teknologi informasi yang terlibat langsung selama proses pengelolaan data keanggotaan sistem OpenBiblio, serta staf PTIPD yang memiliki peran dalam integrasi juga sinkronisasi data pada sistem SALAM. Narasumber dipilih dengan pertimbangan mereka yang terlibat secara aktif, memiliki pengalaman langsung, dan pengetahuan mendalam mengenai proses yang menjadi fokus pada penelitian. Data yang bersifat kualitatif diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan yaitu wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilaksanakan secara semi terstruktur untuk menjaga konsistensi dialog, sekaligus agar tetap terarah sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat, kemudian observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas tata kelola TI, terkhusus pada data keanggotaan.

Pada penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Wawancara semi terstruktur dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator kerangka kerja tata kelola TI yang dikembangkan oleh Peterson. Terdapat tiga kategori utama dalam indikator tersebut, yaitu mekanisme struktural, mekanisme proses, dan mekanisme relasional. Mekanisme struktural mengacu pada cara pengambilan keputusan dan pembagian

wewenang kelembagaan, kemudian mekanisme proses berkelindan dengan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang diterapkan dalam sistem TI, sementara mekanisme relasional membahas alur komunikasi dan kerjasama antar unit terkait.

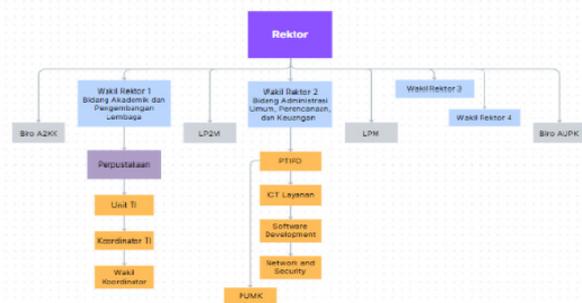
Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian hasil wawancara dan observasi ke dalam kategori yang sesuai dengan indikator kerangka yang dikembangkan Peterson. Alur proses analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang didapat dikelompokkan menurut tiga kategori utama mekanisme tata kelola TI, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan pola, ketidaksesuaian, serta hubungan antara struktur, proses, dan keterkaitan yang terjadi dalam praktik tata kelola TI pada keanggotaan perpustakaan. Melalui pendekatan yang digunakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam terhadap dinamika yang terdapat di lingkup tata kelola TI dalam konteks keanggotaan perpustakaan, sehingga dapat mendukung penelitian serupa di masa mendatang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Struktur Organisasi

Pada lingkup Universitas XYZ terdapat suatu unit strategis yaitu PTIPD yang memiliki tupoksi dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi sekaligus sebagai *data center* di lingkungan universitas. Walaupun terdapat unit yang berfokus pada TI, unit perpustakaan memiliki Unit TI nya tersendiri. Dengan ini, PTIPD yang diwakilkan oleh bidang *Software Development* bersama-sama dengan Unit TI Pusat Perpustakaan Universitas XYZ melakukan integrasi antara sistem akademik SALAM dengan sistem informasi OpenBiblio untuk mendukung kegiatan operasional perpustakaan. PTIPD dipimpin langsung

oleh Kepala PTIPD yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor 2, sedangkan Pusat Perpustakaan Universitas XYZ bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor 1. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan serta pengelolaan mengenai integrasi data keanggotaan membutuhkan peran koordinator TI baik PTIPD maupun perpustakaan, pimpinan PTIPD maupun perpustakaan, serta Wakil Rektor 1 maupun Wakil Rektor 2. Berikut adalah struktur organisasi TI yang melaksanakan integrasi data keanggotaan perpustakaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Faktor Pendukung dan Penghambat

Alur proses integrasi data keanggotaan antara SALAM dengan OpenBiblio memiliki serangkaian tahapan yang sudah dirancang khusus untuk menjaga keamanan data serta sesuai dengan kebutuhan. Proses integrasi data keanggotaan perpustakaan ini dimulai dari pengumpulan data ke sistem akademik sampai mengimpor data ke OpenBiblio merupakan penentu keberhasilan dalam proses integrasi ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan dua narasumber terkait, terdapat beberapa permasalahan terkait kelengkapan data keanggotaan pascasarjana yang belum menyeluruh. Akan tetapi, di samping permasalahan tersebut, cukup banyak usaha yang telah dilakukan sumber daya manusia yang terlibat untuk proses integrasi data keanggotaan ini. Maka dari itu, berikut pemetaan faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja integrasi data keanggotaan antara SALAM

dengan OpenBiblio berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.

Tabel 1. Pemetaan Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Pendukung	Penghambat
Peran PTIPD sebagai koordinator dan integrator	Kuantitas dan kualitas SDM TI PTIPD maupun perpustakaan masih kurang
Adanya dukungan pimpinan terhadap kebutuhan integrasi data	Belum adanya standar serta lemahnya kebijakan TI dalam kegiatan integrasi data antara SALAM dan OpenBiblio
PTIPD memakai sistem integrasi API untuk menghubungkan aplikasi di setiap unit kerja	Sistem integrasi API belum terotomatis dalam injeksi data keanggotaan
Tersedia operator teknis dalam pemrosesan data	Tidak ada proses audit yang baku
Proses injeksi data yang biasa dilakukan PTIPD secara mandiri, kemampuan adaptasi teknis terhadap format dan struktur data	Koordinasi antara PTIPD dengan perpustakaan masih lemah
Baik SDM PTIPD dan Perpustakaan mengikuti pelatihan maupun sosialisasi	Pemberian <i>reward</i> yang kurang terhadap SDM TI, baik TI PTIPD maupun perpustakaan

Analisis Faktor Pendukung

a. Struktur

Adanya kebijakan digitalisasi menunjukkan dukungan struktural yang cukup kuat dalam tata kelola TI di lingkup Perpustakaan Universitas XYZ, hal tersebut dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan Koordinator TI Perpustakaan Universitas XYZ yang mengungkapkan bahwa:

"Otomasi perpustakaan terhitung dari 2019, mengacu SK Rektor terkait digitalisasi, tidak ada standar tertentu (sesuai kebutuhan saja), dan terintegrasi mulai dari tahun 2020," (Wawancara, 26 Mei 2025)

Dengan demikian melalui adanya kebijakan ini pemanfaatan sistem informasi di lingkungan universitas, termasuk perpustakaan memiliki dasar dalam tujuan pengaplikasian juga pengembangannya.

Lebih lanjut melalui wawancara tersebut narasumber yang sama mengungkapkan:

"Kalau pimpinan di perpustakaan mendukung... sempat mendapat internet maksimal dan server baru," (Wawancara, 26 Mei 2025)

Hal tersebut menunjukkan adanya dukungan dari pimpinan tingkat unit sehingga terbentuk inisiatif untuk terus meningkatkan kualitas layanan utamanya dari sisi pengembangan TI. Lebih jauh hal ini menunjukkan penyebaran wewenang dalam struktur perpustakaan, artinya keberhasilan dalam struktur TI perpustakaan tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada respon atau timbal balik yang diberikan oleh pimpinan unit.

Selain hal itu, PTIPD juga telah menjalankan perannya sebagai koordinator TI yang bertanggung jawab terhadap integrasi sistem antar unit, termasuk dengan sistem yang ada di perpustakaan. Kemudian tersedianya operator teknis juga turut menjadi pendukung dalam proses injeksi data, sehingga membantu memastikan prosesnya berjalan sesuai kebutuhan. Keadaan ini menandakan adanya simbiosis struktural, yaitu keadaan di mana dua hal saling bergantung satu sama lain.

Hal tersebut tentunya telah menjadi kerangka kerja awal yang mendukung dalam pengelolaan TI di lingkup operasional.

b. Proses

Dalam ranah proses, injeksi data dari sistem SALAM ke dalam sistem OpenBiblio di perpustakaan telah dilakukan secara rutin setiap tahun oleh PTIPD, hal tersebut menunjukkan bahwa prosedur yang sudah berlangsung cukup lama dapat membentuk rutinitas operasional, meskipun belum tersusun dalam prosedur kerja yang baku.

Untuk saat ini integrasi data mahasiswa sudah bisa dilakukan secara otomatis meski belum seluruhnya. Pernyataan tersebut berdasarkan

wawancara dengan Koordinator TI perpustakaan:

"Kalau sudah terdaftar akun SALAM akan otomatis terdaftar sebagai anggota perpustakaan... mulai angkatan 2023 pascasarjana sudah otomatis jadi anggota," (Wawancara, 26 Mei 2025)

Ini menandakan bahwa proses pengelolaan anggota telah sampai pada tahap semi otomatis, di mana sistem API yang dikembangkan oleh PTIPD mampu melakukan injeksi data tanpa perlu pengolahan manual untuk data angkatan tertentu. Namun, proses ini masih bersifat parsial yang berarti belum secara menyeluruh prosesnya otomatis, sehingga perpustakaan masih sangat bergantung pada ketersediaan dan keakuratan data pada sistem SALAM. Hal ini menjadikan efektivitas pengolahan data anggota bergantung pada interdependensi sistem.

Dari pihak perpustakaan juga telah melakukan *back-up data* dengan penyimpanan di beberapa server untuk menanggulangi gangguan teknis, sehingga perpustakaan telah berupaya melakukan langkah preventif untuk menjaga stabilitas layanan yang ada, ditambah dengan praktik yang telah dilaksanakan secara rutin menjadi hal yang memperkuat dalam stabilitas operasional sistem. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator TI bagian TI perpustakaan:

"Terkait keamanan ada backup terjadwal data keseluruhan," (Wawancara, 26 Mei 2025).

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya pengendalian risiko juga keberlangsungan sistem, meskipun belum dibarengi dengan audit. Kemudian, melalui hal ini TI perpustakaan juga telah memiliki nilai fungsional dalam mendukung layanan yang optimal.

c. Mekanisme Hubungan

Faktor pendukung yang selanjutnya yaitu hubungan kerja antar unit. Pada perpustakaan Universitas XYZ hal ini

menjadi faktor pendukung yang signifikan, di mana dalam praktik tata kelola TI perpustakaan, hampir seluruh mekanisme hubungan sosial antar unit dan individu terlibat. Pernyataan tersebut didapat dari hasil wawancara dengan koordinator TI perpustakaan yang mengungkapkan bahwa telah ada keterbukaan dari PTIPD terkait teknis pengelolaan data keanggotaan perpustakaan, meskipun belum dibahas dalam kegiatan resmi. Hal tersebut didapat dari hasil wawancara Koordinator TI perpustakaan:

"Data yang masuk atau diambil dari PTIPD tidak melalui pengolahan lagi," (Wawancara, 26 Mei 2025)

Lebih lanjut, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan teknis yang tinggi, di mana data yang diberikan PTIPD dianggap sudah siap pakai dan tidak ada kekeliruan. Komunikasi yang telah terjalin juga membantu memastikan kebutuhan operasional perpustakaan terkait data keanggotaan telah terpenuhi. Melalui hubungan kerja situasional keberlangsungan sistem dapat dijaga dengan cukup efektif. Selanjutnya, pustakawan dengan pegawai TI juga biasa saling membantu, serta melakukan pelatihan keterampilan terkait teknis dalam pengelolaan sistem informasi di perpustakaan. Sesuai dengan wawancara bersama Koordinator TI perpustakaan yang mengungkapkan:

"Biasanya ada crossing pekerjaan, mengingatkan atau saling support," (Wawancara, 26 Mei 2025)

Hal ini menjadi budaya kolaboratif yang menjadi kekuatan relasional dalam mendukung praktik tata kelola TI yang baik di perpustakaan. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme hubungan dalam tata kelola TI berkembang melalui komunikasi terbuka, dukungan timbal balik, dan inisiatif bersama.

Analisis Faktor Penghambat

a. Struktur

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan pengguna perpustakaan akan informasi semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik Pusat Perpustakaan Universitas XYZ maupun PTIPD Universitas XYZ harus memaksimalkan pengelolaan integrasi data keanggotaan antara SALAM dengan OpenBiblio. Perlu diketahui bahwa integrasi data keanggotaan yang belum mengoptimalkan fungsionalitas akan berpengaruh saat pengguna ingin mengakses layanan sirkulasi maupun mengakses layanan lainnya. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah kuantitas dan kualitas SDM TI yang mengelola sistem integrasi data keanggotaan SALAM dengan OpenBiblio.

Berdasarkan struktur organisasi, dapat diketahui bahwa pengelolaan sistem integrasi data keanggotaan SALAM dengan Openbiblio merupakan tupoksi dari bagian Software Development di PTIPD. Bagian Software Development PTIPD sendiri saat ini sudah beranggotakan lima orang yang memiliki pembagian kerjanya masing-masing. Namun, saat periode awal pelaksanaan integrasi data antara SALAM dengan OpenBiblio, PTIPD mengalami kekurangan jumlah sumber daya manusianya yang pada akhirnya berimbas pada keefisienan dan keefektifan proses integrasi data antara SALAM dengan OpenBiblio. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan pernyataan narasumber dari PTIPD yang mengatakan:

“Kalau dulu kendalanya kalah jumlah, jadi kita kesulitannya dari segi komunikasi dan anggaran untuk perbaikan (sistem),”

(Wawancara, 2 Juni 2025)

Sementara sejak awal pelaksanaan integrasi sampai saat ini, perpustakaan hanya memiliki dua sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Unit TI Pusat Perpustakaan, kuantitas dari sumber daya manusia yang dimiliki perpustakaan tidak akan terlalu berpengaruh dibandingkan PTIPD karena

peran PTIP sendiri sebagai integrator utama. Hal ini dipetik dari penjelasan narasumber Koordinator TI Pusat Perpustakaan Universitas XYZ:

“SDM paling dari yang PTIPD karena kalau dari perpus buat integrasi tidak terlalu, cuman di awal saja,”
(Wawancara, 26 Mei 2025)

Selain kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga salah satu kunci utama dalam keberhasilan integrasi data keanggotaan karena tugas dari sumber daya manusia sendiri adalah merancang, menerapkan, mengoperasikan, serta melakukan pemeliharaan sistem integrasi tersebut. Jika ditinjau dari segi *hard skill* sumber daya manusia yang mengelola integrasi data keanggotaan antara SALAM dengan OpenBiblio, mereka sudah menguasai tata laksana dari tupoksinya karena semua sumber daya manusia pada bagian Software Development PTIPD memiliki latar belakang TI. Namun, berbeda pada TI perpustakaan yang hanya memiliki jumlah sumber daya manusia terbatas. Yang memiliki latar belakang TI hanya Koordinator TI nya saja. Selain itu, permasalahan kualitas sumber daya manusia di antara keduanya terletak pada kesadaran terkait kondisi yang terjadi pada lingkungan kerjanya. Dari PTIPD dan Pusat Perpustakaan sendiri masih belum merasa kondisi integrasi data pascasarjana maupun integrasi data lainnya bukan sebuah masalah serius. Hal ini dipetik dari penjelasan narasumber PTIPD Universitas XYZ:

“Integrasi belum 100%, misal masalah transkrip setiap fakultas masih berbeda format. (waktu itu) siastnya bikin Excel, nanti mereka menyesuaikan dengan template masing-masing. Biasalah itu, entah jadi problem atau tidak,”
(Wawancara, 2 Juni 2025)

Selain itu, didukung oleh petikan dari hasil wawancara dengan Koordinator TI Pusat Perpustakaan Universitas XYZ:

“Kalau keterlibatan, semua juga terlibat. Kalau kesadaran, ya, mungkin

*kalau dipresentasikan 75%,”
(Wawancara, 26 Mei 2025)*

Untuk mengatasi hal tersebut, antara PTIPD Universitas XYZ dan Pusat Perpustakaan Universitas XYZ perlu mengikuti lebih banyak pelatihan, sosialisasi, maupun lebih

b. Proses

Dalam upaya menghadapi tuntutan pengguna perpustakaan, Pusat Perpustakaan mencoba mengaplikasikan teknologi informasi dengan meminta lembaga PTIPD Universitas XYZ untuk mengintegrasikan data keanggotaan antara sistem akademik universitas ke sistem informasi perpustakaan. Tata kelola TI merupakan suatu aspek penting dalam penentu keberhasilan integrasi data keanggotaan karena selain berperan dalam memperkuat keamanan dan kehandalan sistem integrasi, tata kelola TI juga memelihara efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta keselarasan dengan kebijakan yang berlaku. Namun, masih banyak lembaga yang belum mengimplementasikan teknologi informasi mereka dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, salah satunya adalah kerja sama yang dilakukan antara PTIPD dengan Pusat Perpustakaan Universitas XYZ dalam mengimplementasikan teknologi informasi pada layanan keanggotaan perpustakaan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sistem integrasi yang dikelola oleh PTIPD Universitas XYZ tidak memiliki standar yang jelas serta lemahnya kebijakan yang berlaku karena masing-masing unit TI masih memiliki standarisasi maupun kebijakan masing-masing.

Permasalahan ini tentunya berimbas terhadap evaluasi dan audit sistem informasi maupun sistem integrasi. Berdasarkan hasil wawancara, proses evaluasi sistem dan audit dilakukan masing-masing unit TI karena belum terdapat proses evaluasi dan audit sistem informasi maupun sistem integrasi dari Satuan Pengawas Internal maupun

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas XYZ. Satuan Pengawas Internal pada lingkungan Universitas XYZ memiliki tupoksi untuk melaksanakan audit dan penilaian pada bidang keuangan serta kinerja penelitian, sedangkan tupoksi dari Lembaga Penjaminan Mutu sendiri adalah mengkoordinasikan, mengaudit, memantau, menilai, serta mengembangkan mutu pada pelaksanaan kegiatan akademik. Dari uraian tupoksi kedua unit tersebut dapat diketahui bahwa kedua unit tersebut hanya berfokus pada proses evaluasi dan audit kegiatan akademik saja, tidak dengan sistem informasi maupun sistem integrasi di lingkungan Universitas XYZ. Hal ini sesuai dengan penjelasan narasumber PTIPD Universitas XYZ:

“... Audit tidak ada, mandiri saja, testing sendiri. Jadi, setiap pembaruan di-testing terlebih dahulu sesuai kebutuhan tidak...”

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan dari Koordinator TI Pusat Perpustakaan Universitas XYZ sebagai berikut:

“....Audit sesekali, kalau PTIPD kayaknya melakukan (audit), soalnya data redensialnya yaitu data user ada di PTIPD. Lalu, kalau mau langganan audit profesional seperti ISO dan COBIT lumayan juga biayanya dan nampaknya dari internal juga belum sampai ke arah sana auditnya (sistem informasi), seperti LPM yang kegiatan auditnya masih di ranah akademik saja. Jadi, tidak sampai ke sistem informasinya...”

Oleh karena itu, akibat tidak adanya standar atau kebijakan yang baku, serta tidak ada evaluasi dan audit dalam tingkat universitas menyebabkan pengerjaan integrasi data keanggotaan tidak maksimal, seperti pemindahan data keanggotaan ke OpenBiblio yang masih semi otomatis. Hal ini dipetik berdasarkan pernyataan narasumber PTIPD Universitas XYZ:

“....Kebetulan saya yang setiap tahun memindahkan data. Saya input datanya ke OpenBiblio, cuman

prosesnya tidak otomatis. Jadi, masih di-inject. Saya kan pikirannya (pemindahan data) setahun sekali. Jadi, cukuplah diimpor saja, soalnya kan setahun sekali dan itu tidak menyusahkan ketimbang harus ngoding buatin satu....”

c. Mekanisme Hubungan

Koordinasi memiliki peran vital untuk individu, tim, unit organisasi maupun antar unit organisasi dalam mencapai efektifitas, efisiensi, produktivitas dari pelaksanaan kegiatannya. Lebih jelasnya menurut (Wardhana dan Si, 2024), koordinasi merupakan proses yang dapat menciptakan keselarasan dan menyinkronkan keputusan dengan upaya individu, tim, unit organisasi maupun antar unit organisasi. Salah satu prinsip utama dalam koordinasi adalah hubungan antara produsen dan konsumen. Hubungan produsen-konsumen ini menekankan akan pentingnya interaksi yang optimal antara dua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, antara PTIPD Universitas XYZ dengan Pusat Perpustakaan Universitas XYZ merupakan hubungan produsen dan konsumen. Dalam pelaksanaannya, Pusat Perpustakaan sebagai konsumen yang mengonsumsi produk integrasi data keanggotaan yang dikelola PTIPD Universitas XYZ masih mendapatkan beberapa kesulitan teknis dalam penggunaannya, seperti inkonsistensi permintaan termasuk data keanggotaan pascasarjana yang tidak lengkap. Terjadinya inkonsistensi permintaan ini disebabkan oleh proses sharing pengetahuan maupun kebutuhan kurang terorganisir. Jadi, dalam proses sharing antara PTIPD Universitas XYZ dengan Pusat Perpustakaan masih acak dan kurangnya dokumentasi. Hal ini dipetik berdasarkan pernyataan Koordinator TI Pusat Perpustakaan Universitas XYZ:

“....Kesulitannya paling di teknis, datanya tidak support. Misalnya perpustakaan butuh 4 data, tapi yang diberikan hanya 3. Selain itu, ada

beberapa data yang tidak masuk sesuai yang diajukan, misalnya foto mahasiswa. Lalu, untuk masalah data pascasarjana yang belum total secara keseluruhan wajar saja karena dalam masa transisi....”

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik dengan membuat standar tata kelola TI yang jelas, menciptakan komunikasi yang efektif antara keduanya, mengalokasikan sumber daya manusia yang tepat, serta melakukan pengawasan dan penyesuaian terhadap permasalahan yang muncul di perpustakaan.

Faktor penghambat lain dalam pengelolaan integrasi data keanggotaan perpustakaan adalah kurangnya *reward* di luar penghasilan mereka, serta di samping tuntutan pekerjaan mereka yang *overwork*. Hal ini berakibat pada kinerja mereka, baik Unit PTIPD maupun Pusat Perpustakaan dalam pengelolaan integrasi data keanggotaan. Dengan demikian, setiap unit harus memenuhi dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, seperti memberikan kesempatan lebih untuk melakukan pelatihan maupun sosialisasi, serta menyediakan kegiatan refleksi seperti *outbond* yang dapat mempererat hubungan antar rekan kerja.

Langkah Strategis untuk Manajemen Organisasi TI

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh manajemen Teknologi Informasi (TI) di lingkungan perpustakaan adalah memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), unit perpustakaan, unit akademik (khususnya pascasarjana), serta para pengambil kebijakan internal institusi. Strategi ini sejalan dengan temuan (Sari, 2024) dalam studinya mengenai transformasi perpustakaan inklusif di Kabupaten Magelang, yang menekankan pentingnya forum koordinatif dan komitmen kelembagaan sebagai kunci

keberhasilan kolaborasi. Tujuan dari penguatan koordinasi ini adalah untuk menciptakan keselarasan sistem, meningkatkan efisiensi kerja lintas unit, serta mengoptimalkan pengelolaan data pengguna.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membentuk tim kerja lintas unit yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing pihak terkait. Tim ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan bertanggung jawab dalam merumuskan solusi bersama terhadap berbagai persoalan integrasi data maupun pengembangan sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya, diperlukan forum komunikasi yang bersifat berkala, baik melalui rapat resmi maupun diskusi informal seperti forum diskusi kelompok (FGD). Hal ini diperkuat oleh (Gammayani et al., 2015) yang menunjukkan bahwa kombinasi komunikasi tatap muka dan digital mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga perpustakaan.

Langkah berikutnya adalah penyusunan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur mekanisme koordinasi secara sistematis. Dokumen SOP ini berfungsi menjaga konsistensi dan kesinambungan koordinasi, terutama ketika terjadi perubahan personel. Selain itu, pemanfaatan platform digital kolaboratif seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan aplikasi serupa dapat mempercepat proses komunikasi dan dokumentasi lintas unit. Penelitian yang sama oleh (Gammayani et al., 2015) juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi kolaboratif mendukung pertukaran informasi yang lebih efisien serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Untuk memperkuat pelaksanaan strategi ini, sosialisasi dan pelatihan bersama juga perlu diselenggarakan guna memastikan bahwa setiap unit memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses integrasi data. Terakhir, penerapan indikator kinerja kolaboratif (collaborative KPI) menjadi

penting sebagai alat ukur efektivitas koordinasi. Indikator ini dapat mencakup kecepatan penyelesaian masalah teknis, tingkat kepuasan pengguna, serta persentase keberhasilan integrasi sistem. Dengan rangkaian langkah tersebut, diharapkan terwujud sinergi yang berkelanjutan antara unit TI, perpustakaan, dan seluruh pihak terkait dalam membangun sistem informasi perpustakaan yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan institusi.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas, dapat diketahui bahwa dalam permasalahan pada pelaksanaan layanan keanggotaan Pusat Perpustakaan Universitas XYZ berkaitan dengan proses integrasi data antara PTIPD Universitas XYZ dengan Pusat Perpustakaan. Apabila mengacu pada tata kelola TI menurut Peterson, tidak semua penerapan tata kelola TI dilaksanakan dengan baik dan lancar karena masih terdapat berbagai penghambat di samping faktor-faktor pendukung. Adapun dalam pengelolaan integrasi data keanggotaan ini, baik PTIPD Universitas XYZ dan Pusat Perpustakaan didukung penuh oleh rektor melalui Surat Keputusan Rektor tentang Digitalisasi. Namun, kebijakan tersebut masih lemah karena belum terdapat kebijakan terbaru guna menguatkan PTIPD sebagai integrator dan koordinator pengelolaan integrasi sistem informasi. Selain itu, penggunaan standar dalam tata kelola TI yang digunakan PTIPD Universitas XYZ masih belum begitu jelas, sehingga berimbas terhadap prosedur pengelolaan integrasi sistem antar unit. Dapat disimpulkan bahwa penghambat pelaksanaan integrasi data keanggotaan Pusat Perpustakaan berakar dari kebijakan serta standar. Oleh karena itu, baik PTIPD Universitas XYZ maupun Pusat Perpustakaan perlu mengeluarkan solusi

terkait pedoman bagi seluruh antar unit TI di lingkup Universitas XYZ.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arbiansyah, G., Kristianto, D., & Neneng. (2010). Pemetaan Model Tata Kelola Teknologi Informasi Yang Menunjang Strategi Dan Visi Organisasi Di Indonesia Pada Bank Swasta XYZ. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, B133–B137.

Gamayani, D., Nabawi, I. H., & Alfatih, M. I. (2015). Utilization of Information and Communication Technology in Coordination between the National Library with the Provincial Library. *Record and Library Journal*, 1(2), 120–128. <https://doi.org/10.20473/rlj.V1-I2.2015.120-128>

Heriyanto, L. (2018). Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Integrasi Data Antar Unit TI: Studi Kasus Pusintek XYZ. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen*, 16(2), 92–101.

Pratiwi, Y., & Widiyanti, L. W. (2025). Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Pada Salah Satu Bank Milik BUMN. *JKBTI: Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi*, 4(2), 98–113. <https://doi.org/10.69916/jkbti.v4i2.281>

Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ramadhani, R., Rezy, F. A., Herdiyanto, O., & Waluyo, I. G. (2023). Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Instansi (Systematic Literature Review). *JUTECH: Journal Education and Technology*, 4(2), 140–149. <https://doi.org/10.31932/jutech.v4i2.3014>

Sari, L. I. (2024). Tata Kelola Kolaborasi

Pembangunan Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 94–111. <https://doi.org/10.70214/zpe3bj18>